

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Pekalongan

272 Desa Gunakan Aplikasi Siskuedes

<http://radarpekalongan.co.id/50490/272-desa-gunakan-aplikasi-siskuedes/>

KAJEN - Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, seluruh desa (272 desa) yang ada di Kabupaten Pekalongan sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (Siskuedes) pada tahun 2018 ini. Memasuki anggaran tahun 2019, semuanya sudah berbasis online.

Hal itu diungkapkan Bupati Pekalongan Asip Kholbihi, saat membuka kegiatan Workshop Evaluasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskuedes, di aula lantai I Setda Kabupaten Pekalongan, Rabu (7/11) kemarin.

Ia mengatakan, dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Desa (SID), juga telah dipersiapkan akses layanan kependudukan, profil desa, tata kelola aset desa dan layanan masyarakat

dalam rangka pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Bupati mengungkapkan bahwa acara workshop itu sangat penting dan strategis terutama untuk membangun performance tata kelola pemerintah desa. Untuk itu, Bupati mengharapkan para peserta hendaknya dapat menyimak apa yang disampaikan oleh para narasumber dengan baik. Momen ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menyerap pengetahuan dari narasumber.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan, dana desa di Kabupaten Pekalongan sudah lumayan baik karena hampir tiap bulan telah diadakan acara-acara seperti ini. Sebelumnya juga ada kegiatan sinkronisasi pengawasan dengan mengundang seluruh kepala desa dan bhabin-kamtibmas.

"Mudah-mudahan ini menjadi pengalaman kita bersama dan saya bersyukur karena pada tahun 2018 hingga bulan Nopember ini kasus yang ada di desa-desa kita adalah zero alias tidak ada kasus yang menyangkut tentang pengelolaan dana desa. Apalagi setelah workshop ini saya kira akan menambah lagi bagaimana aspek kehati-hatian dan mengikuti sistem untuk mengelola dana desa," ujar Bupati.

Di sisi lain, kata Bupati, Pemkab Pekalongan juga sudah mulai membangun tata kelola pemerintah menuju e-government yang berorientasi kepada keterbukaan informasi publik dan yang kita dorong adalah pemanfaatan single data sistem (SDS). Kemudian pada tahun 2019 nanti semua yang bersifat e-gov sudah kita integrasikan seperti e-planning dan e-budgeting.

Secara umum terjadi peningkatan secara kuantitatif dan kualitatif tentang dana desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. "Ada bocoran, untuk tahun 2019 ada dua syarat desa mendapatkan dana desa sebesar Rp 1 sampai Rp 1,3 Miliar. Syaratnya tahun 2018 clear and clean, tidak ada persoalan, terserap semuanya," tuturnya.

Bupati mengatakan untuk tahun 2017-2018 penggunaan dana desa di Kabupaten Pekalongan bisa melakukan optimalisasi. Namun diharapkan pada aspek pemberdayaan masyarakat akan lebih dikuatkan kembali.

"Kalau kemarin, kita masih fokus kepada pembangunan fisik di desa. Mulai tahun 2018 kita mendapat mandat untuk bagaimana 30% dari Rp 209 milyar atau sekitar Rp 62 milyar kita alokasikan untuk program spesifik padat karya tunai dalam rangka pengurangan angka kemiskinan di desa. Ini sudah mulai yang padat karya. Saya juga melaunching sendiri, manfaatnya sangat banyak. Ke depan mungkin seluruh program dana desa akan dipadatkaryakan. Jadi duit itu berputar di desa semua sehingga mendatangkan multiplier effect di desa dan tentu pertumbuhan ekonomi di desa akan semakin naik," pungkasnya.

Workshop dengan tujuan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah desa yang partisipatif, transparan dan akuntabel tersebut, dihadiri oleh Wakil Bupati Arini Harimurti, Kepala BPKP Jawa Tengah beserta jajaran, unsur Forkompinda, para Kepala OPD se Kabupaten Pekalongan. Dan diikuti oleh seluruh Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan.

Workshop sehari tersebut menghadirkan narasumber yang sabfat kompeten di bidangnya, yakni antara lain Anggota Komisi XI DPR RI Prof DR Hendrawan Supratikno, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Drs. Gatot Darmanto, Kepala Perwakilan BPK RI Jawa Tengah Heri Subowo, Kasubdit Binpolmas Polda Jateng AKBP Hendro Widyanto. (yan)

SUBBAGIAN HUMAS PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH